



Buletin Inovasi dan Pembangunan Sosial Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

Volume 5 Nomor 1, 2025

Pengabdian kepada Masyarakat

"Sosiologi Masyarakat Pesisir : Sebuah Ekplorasi Dinamika Sosial dan Tantangan Kehidupan di Garis Pantai"



Kata Pengantar

Buletin Inovasi dan Pembangunan Sosial yang dikelola oleh Program Studi Sosiologi dan Himpunan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional saat ini telah sampai pada terbitan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025. Pada edisi kali ini mengusung tema “Sosiologi Masyarakat Pesisir : Sebuah Ekplorasi Dinamika Sosial dan Tantangan Kehidupan di Garis Pantai”

Terbitan edisi kali ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buletin. Tim redaksi buletin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen Prodi Sosiologi FISIP UNAS, seluruh penulis naskah buletin, Divisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat HIMASOS, seluruh panitia Sociology Camp Tahun 2025, seluruh kepengurusan HIMASOS, seluruh mahasiswa Prodi Sosiologi FISIP UNAS, mitra kerja sama Desa Citemu dan Desa Warawudur, para kelompok umkm, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya.

Pada edisi terbitan buletin kali ini terdiri dari empat judul pembahasan yang merupakan hasil penelitian lapangan yang ditulis oleh para peserta kegiatan Sociology Camp VII di Desa Citemu dan Desa Warawudur, Kota Cirebon Jawa Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat HIMASOS. Semoga terbitan edisi kali ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan baru bagi para pembaca. Selamat membaca!

Jakarta, 5 Oktober 2025

Pimred Buletin

Daftar Isi

“Fungsi Sosial Keluarga dan Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting: Perspektif Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons (Studi di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon)”

Dimas Surya Affandi, Shafa Adinda Khairunnisa, Khusnul Khoirizay, Deffa Zainalia, Satria Putra Rama, Desta Alawanda, Aimee Regina Fauzka

"Kelekatan Sosial Jaringan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon "

Anisa Rahmadyah Betaviani, Auninda Ratriva Afiansyah, Dwie Yulliana Wahyuningrum, Muhammad Farih El Hanan, Nurmima Rochmah Ghassani, Rizky Adhitya Fadillah, Khresna Banyu Janaka

"Kolektivitas Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Limbah Cangkang Rajuangan di Desa Warawudur"

Nilam Putri Defa, Muhammad Fadli, Aziz Hafiz, Alois Ryandana, Haryono, Hanifah Rahmayani, Emilia Hafidzah, Muhammad Dafryansah Ismail

"Habitus Sosial dan Keterbatasan Modal:

Hambatan Realisasi Potensi Mangrove di Desa Waruduwur"

Anastasya Putri, Keiko Dinda, Meidavyana Putri Wibowo, Michael Delon Patadungan, Muhammad Candra, Mohammad Farrel Khadafi, Sarah Rabiatal Aulia

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Program Studi Sosiologi Universitas Nasional
Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional

Pembina

Dr. Andi Achdian, M.Si.
Ichmi Yani Arinda Rohmah, S.Pd., M.Sosio
Prof. Aris Munandar, M.Si
Prof. Syamsiah Badruddin, M.Si
Adilita Pramanti, S.Sos
Drs. Khairul Fuad, MA
Prof. Dr. Sigit Rochadi, M.Si.
Havizathul Hanim, S.Sos., M.Si
Dr. Jeanne Noveline Tedja, M.Kesos
Dr. Qonitah Basalamah, M.Si
Yani Fathur Rohman, S.Sos., M.Si
Gratia Wing Artha, S.Sosio., M.Sosio

Pemimpin Redaksi

Lasnaria Siagian

Editor

Lasnaria Siagian
Firda Aulia
Chalisa Salsabila
Dzimar Muhammad Azzam
Ghazy Abiyyu Arkan
Lulu Kholifah
Devina Anggraeni
Fany Handayani Rahmawati

Designer & Layouter

Firda Aulia

Sekretariat

Amira Rosita Fatin
Nazwa Salsabila



“Fungsi Sosial Keluarga dan Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting: Perspektif Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons (Studi di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon)”



Penulis :

**Dimas Surya Affandi, Shafa Adinda Khairunnisa,
Khusnul Khoirizay, Deffa Zainalia, Satria Putra Rama,
Desta Alawanda, Aimee Regina Fauzka**



Stunting yang merupakan suatu kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup, masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada terhambatnya pertumbuhan fisik, namun juga pada perkembangan, kognitif, produktivitas serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Untuk informasi mengenai data stunting di Desa Citemu, tidak tersedia data yang menjelaskan secara spesifik, namun menurut keterangan dari bapak Kepala Desa jumlah stunting di Desa Citemu ini mengalami kenaikan, sebelumnya 10 menjadi 20 kasus (Wawancara Kuwu Desa, 2025).

Selain keluarga, kader posyandu juga berperan sebagai agen perubahan dalam mendukung pencegahan stunting. Kader posyandu disini bertugas dalam penyuluhan, penimbangan berat badan dan pemantauan gizi anak secara rutin. Namun terdapat kendala yang menjadikan fungsi sosial dari kader posyandu tersebut menjadi tidak efektif, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan hingga kurangnya koordinasi dengan keluarga atau pihak terkait. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsionalisme dari Talcott.

Parsons, dimana pada teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat dilihat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai aspek yang berkolaborasi dalam menjaga stabilitas sistem sosial.



Parsons juga menjelaskan terdapat empat aspek penting yang perlu dipenuhi guna menjaga sistem sosial agar tetap stabil, yakni Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian Tujuan), Integration (Integrasi) dan Latency (Pemeliharaan Pola) disingkat sebagai AGIL. Dengan menggunakan teori Talcott Parsons dalam menganalisis fungsi sosial keluarga dan kader posyandu ini, diharapkan dapat mengetahui apa saja hambatan fungsional yang ada, serta merumuskan rekomendasi yang lebih terstruktur dan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan pencarian yang dilakukan, belum ada data yang menjelaskan secara eksplisit mengenai angka stunting di Desa Citemu ini. Namun, menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Kuwu, angka stunting di desa ini mengalami peningkatan setidaknya dari 10 menjadi 20 kasus dalam kurun waktu yang tidak dijelaskan secara spesifik, sedang berdasarkan wawancara dengan Ibu Kuwu, beliau menyatakan:

“Kasus stunting di Desa Citemu mengalami peningkatan dari sekitar 10 anak menjadi 20 anak dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah desa bersama kader posyandu dan PKK berupaya menekan angka tersebut dengan memberikan makanan tambahan, mengadakan kelas ibu hamil, dan melakukan rembuk stunting setiap tahun.”





Meskipun data detail untuk desa Citemu belum tersedia, angka stunting di tingkat kabupaten dapat menjadi indikator yang relevan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tercatat prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Data prevalensi stunting yang relatif tinggi dan fluktuatif di Kabupaten Cirebon, termasuk di Desa Citemu, menunjukkan adanya disfungsi atau ketidakseimbangan dalam sistem sosial. Tingginya angka stunting, terutama pada balita mencerminkan adanya kegagalan dalam sistem keluarga dalam beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial.

Perubahan pada angka stunting juga menjelaskan tingkat integrasi atau koordinasi antara keluarga dan kader posyandu. Angka yang fluktuatif mengindikasikan terjadinya disintegrasi dalam sistem.

Di desa Citemu, Kabupaten, Cirebon, penelitian mengenai fungsi sosial keluarga dan kader posyandu dalam pencegahan stunting menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran utama dalam pemenuhan gizi anak, dan kader posyandu bertindak sebagai penyuluh Kesehatan yang memberikan informasi, layanan, dan pemantauan perkembangan balita. dari sudut pandang struktural fungsionalisme Talcott Parsons, keberlangsungan sistem sosial sangat ditentukan oleh bagaimana setiap komponen dalam hal ini keluarga dan kader posyandu menjalankan fungsi yang mendukung stabilitas atau keseimbangan dalam masyarakat.

keluarga telah berusaha memenuhi kebutuhan gizi anak dengan memberikan makanan pokok, lauk-pauk dari hasil tangkapan laut ayah, dan buah-buahan. Menurut informasi dari narasumber pertama (ibu Ria), meskipun ibu sering membawa anaknya ke posyandu, pemahaman mereka tentang grafik pertumbuhan dan rekomendasi gizi masih kurang, sehingga fungsi pencapaian tujuan (Goal Attainment) belum maksimal. Pada narasumber kedua (ibu Berlian), terlihat bahwa keluarga menjalankan fungsi integrasi melalui partisipasi kerabat, terutama nenek, dalam menyusun jadwal makanan anak. Anak-anak masih mendapatkan ASI dan susu formula sebagai tambahan.

Pada narasumber ketiga (ibu Ida), keluarga menunjukkan upaya untuk menyediakan makanan bergizi seperti telur, ikan, sayur-sayuran dan susu formula kepada anak tersebut. anaknya juga mendapatkan vitamin dari posyandu secara teratur. Ada dinamika tambahan, menurut narasumber keempat (ibu Tursini), anak-anak biasanya mendapatkan protein hewani dari ikan, udang, dan telur, tetapi mereka kurang menyukai sayur dan lebih suka makanan ringan seperti biskuit atau ciki. Kader Posyandu memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengatasi masalah pertumbuhan terhambat pada anak. Tanggung jawab kader adalah mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengalami pertumbuhan terhambat.



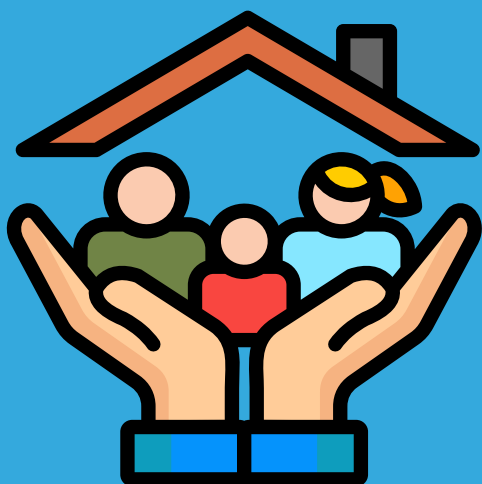
Kontribusi PKK dalam masyarakat untuk melawan stunting adalah dengan menyediakan akses sumber daya dan menggerakkan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. PKK berperan penting karena membantu memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting, khususnya melalui program seperti dasawisma.

Kader Posyandu dan PKK memiliki peran komunitas yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam pencegahan stunting. Kader Posyandu berfokus pada aspek teknis, seperti pengukuran dan edukasi langsung kepada keluarga, sementara PKK berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta pengorganisasian program pencegahan stunting.

Pada sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa Citemu, Ibu Kuwu menegaskan bahwa kader posyandu dan PKK berkolaborasi dalam setiap program pencegahan stunting, termasuk rembuk stunting tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PKK tidak hanya terbatas pada kegiatan dasawisma, tetapi juga memperkuat peran kader posyandu dalam edukasi gizi dan kesehatan. Kegiatan ini sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan dan membuat langkah-langkah strategis.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan isu sosial yang tidak dapat diatasi hanya dengan bantuan medis. Dengan menggunakan pendekatan struktural fungsionalisme Talcott Parsons, dapat dijelaskan bahwa tingginya angka stunting di Desa Citemu mencerminkan adanya disintegrasi dan ketidakseimbangan dalam sistem sosial. Keberhasilan penanganan stunting dapat terwujud jika seluruh aktor, seperti keluarga, kader posyandu dan PKK mampu menjalankan perannya secara maksimal dan saling mendukung



"Kelekatan Sosial Jaringan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon"



Penulis :

**Anisa Rahmadyah Betaviani, Auninda Ratriva
Afiansyah, Dwie Yulliana Wahyuningrum,
Muhammad Farih El Hanan, Nurmima
Rochmah Ghassani, Rizky Adhitya Fadillah,
Khresna Banyu Janaka**



Desa Citemu merupakan sebuah desa pesisir sangat bergantung pada sektor perikanan tangkap, khususnya nelayan rajungan, di mana sekitar 81,98% penduduk berprofesi sebagai nelayan. Sisanya terlibat dalam sektor informal seperti buruh, pedagang kecil, atau UMKM. Rajungan menjadi komoditas utama yang mendominasi ekonomi lokal, dengan kehidupan sosial masyarakat erat terkait hasil laut. Ibu-ibu yang bekerja sebagai pengupas rajungan memperoleh rata-rata Rp200.000 per hari, yang bisa mencapai Rp4-5 juta per bulan. Namun, pendapatan ini sering tidak dikelola dengan baik akibat kurangnya perencanaan keuangan, pola konsumtif, dan ketidakstabilan faktor eksternal seperti cuaca, musim, kondisi pasar, perubahan ekosistem laut, atau penurunan harga. Hal ini membuat stabilitas ekonomi rumah tangga nelayan rentan, sering mengalami fluktuasi yang memukul penghasilan mereka.



Masyarakat Desa Citemu merespons dengan mengembangkan UMKM berbasis pengolahan hasil laut, seperti mengubah telur rajungan yang bernilai rendah menjadi produk bernilai tinggi seperti sumpia atau kerupuk. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga melibatkan kelompok ibu-ibu dalam produksi, memperkuat solidaritas sosial dan memperluas peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga.



Masyarakat Desa Citemu merespons dengan mengembangkan UMKM berbasis pengolahan hasil laut, seperti mengubah telur rajungan yang bernilai rendah menjadi produk bernilai tinggi seperti sumpia atau kerupuk. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga melibatkan kelompok ibu-ibu dalam produksi, memperkuat solidaritas sosial dan memperluas peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga.

Salah satu informan yaitu Herlina, sebagai contoh, memanfaatkan media sosial untuk memasarkan abon rajungan hingga ke luar Jawa dan bahkan luar negeri, membuktikan potensi ekspansi pasar. Meskipun demikian, UMKM ini dihadapkan pada keterbatasan seperti kekurangan tenaga kerja dan dukungan alat produksi, yang menunjukkan bahwa inovasi memerlukan bantuan kelembagaan dan sosial untuk berkembang. Secara keseluruhan, UMKM menjadi sarana pemberdayaan perempuan dan strategi adaptif kolektif bagi masyarakat Desa Citemu dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat ketergantungan pada hasil laut. Hal ini mengilustrasikan bagaimana aspek sosial dan ekonomi saling terkait erat, membentuk ketahanan komunitas pesisir.



Masyarakat Desa Citemu berinovasi dalam mengolah rajungan menjadi produk khas seperti abon rajungan, sumpia rajungan, dan kerupuk rajungan. Proses pembuatan abon rajungan, misalnya, melibatkan merebus daging rajungan, menyuwirnya, menambahkan bumbu, kemudian mengeringkan dan mengemasnya. Inovasi ini dimulai dari inisiatif pribadi, seperti yang dilakukan Bu Herlina, dan berkembang melalui dukungan sosial, dengan pemasaran utama via media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Produk-produk ini tidak hanya populer di pasar lokal, tetapi juga menjangkau konsumen internasional, termasuk Hongkong, Taiwan, dan Jepang, melalui praktik jasa titip (jastip) atau reseller yang dimediasi oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW). Meskipun produksi UMKM sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, kini sektor ini bangkit kembali, didukung oleh inovasi nelayan lokal.

Nelayan Desa Citemu telah beralih menggunakan wadong, alat perangkap rajungan yang ramah lingkungan, menggantikan bahan kimia berbahaya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Inovasi ini memastikan ketersediaan bahan baku berkelanjutan bagi UMKM, sekaligus mendukung budidaya rajungan yang digerakan oleh kelompok nelayan.

Keberhasilan pengembangan UMKM ini erat dengan kelekatan sosial masyarakat, yang mencakup kerja sama antar nelayan, pemanfaatan teknologi digital untuk distribusi, dan jaringan sosial dengan TKW di luar negeri. Strategi pemasaran Bu Herlina, seperti memposting produk di Facebook dan berkomunikasi via WhatsApp, menunjukkan peran penting teknologi sebagai mediator, di mana relasi kepercayaan menjadi kunci distribusi global.

Pengembangan UMKM berbasis rajungan di Desa Citemu mencerminkan kreativitas lokal yang didukung oleh inovasi teknologi dan sosial. Hal ini tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat keberlanjutan lingkungan. Namun, untuk menjaga momentum, diperlukan penguatan modal sosial melalui strategi bersama, agar UMKM tidak bergantung pada individu semata, melainkan menjadi gerakan komunitas yang berkelanjutan. Dengan demikian, Desa Citemu menjadi contoh bagaimana inovasi lokal dapat berintegrasi dengan jaringan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.



Masyarakat Desa Citemu menunjukkan kesadaran kreativitas yang tinggi dalam memanfaatkan potensi lokal, khususnya rajungan, sebagai pilar penguatan ekonomi desa. Berdasarkan wawancara dengan Bu Herlina, pelaku UMKM abon rajungan, produk olahan ini telah berhasil menembus pasar lokal, nasional, dan bahkan internasional melalui jaringan pekerja migran serta pemanfaatan media digital sederhana. Inovasi ini menjadi bukti nyata bagaimana kreativitas dapat membuka peluang global bagi produk lokal. Selama pandemi COVID-19, saat ekspor rajungan mentah menurun, Bu Herlina merespons dengan meningkatkan produksi abon rajungan, mengubah krisis menjadi peluang ekonomi kreatif. Namun, ia menghadapi tantangan seperti kesulitan pemasaran, kekurangan tenaga kerja, keterbatasan modal, dan perluasan pemasaran digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitas pemasaran digital, sertifikasi produk, dan bantuan modal untuk mengatasi hambatan ini.

Di sisi lain, inisiatif dari Pak Tirno melalui Kelompok Usaha Bersama nelayan menekankan keberlanjutan ekologis dan ekonomi. Mereka membudidayakan indukan rajungan bertelur dan melepaskan bibit kembali ke laut, memastikan stok rajungan tetap terjaga untuk mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang. Hal ini mencerminkan integrasi antara kesadaran lingkungan dan kegiatan ekonomi, di mana keberlanjutan sumber daya alam menjadi dasar bagi kelangsungan UMKM. Pemasaran produk UMKM di Desa Citemu juga didukung oleh jaringan sosial masyarakat pesisir, baik secara lokal maupun internasional, serta peran aktif Pemerintah Desa Citemu.



Dukungan ini telah membantu kesuksesan berbagai UMKM, seperti pengolahan ikan menjadi makanan olahan atau perdagangan ikan mentah siap saji. Keberhasilan ini menginspirasi kelompok masyarakat lain untuk mengembangkan bisnis serupa, memperkuat kemandirian ekonomi desa. Secara keseluruhan, kemandirian ekonomi Desa Citemu bergantung pada dua aspek utama: peningkatan UMKM yang berfokus pada olahan rajungan sebagai produk unggulan, dan pengelolaan sumber daya rajungan secara berkelanjutan melalui budidaya dan konservasi. Kedua aspek ini saling mendukung, menciptakan sinergi antara ekonomi kreatif dan ekologi lokal. Namun, untuk mencapai keberlanjutan, masyarakat memerlukan bantuan eksternal, seperti pendampingan pemasaran digital, akses permodalan, pelatihan teknologi pengolahan hasil laut, dan kebijakan konservasi pesisir. Dengan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak luar, harapan menuju kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal di Desa Citemu dapat terwujud secara realistis dan berkelanjutan.



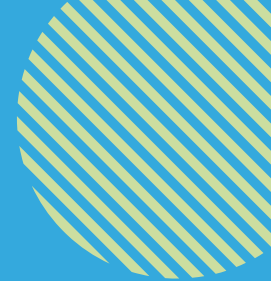
"Kolektivitas Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Limbah Cangkang Rajuangan di Desa Warawudur"



Penulis :

Nilam Putri Defa, Muhammad Fadli, Aziz Hafiz, Alois Ryandana, Haryono, Hanifah Rahmayani, Emilia Hafidzah, Muhammad Dafryansah Ismail





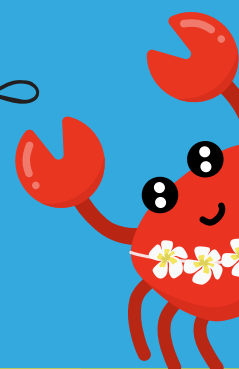
Berada di pesisir Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Desa Waruduwur dikenal luas sebagai sentra rajungan, aktivitas nelayan dan industri pengupasan menjadikan komoditas ini identitas ekonomi lokal sekaligus penghasil limbah cangkang dalam jumlah besar.

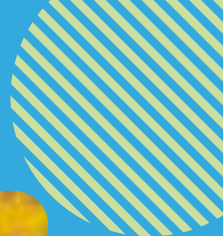


Teori jaringan sosial yang dikemukakan oleh Mark Granovetter memberikan kerangka penting untuk menganalisis dinamika kolektivitas di masyarakat pesisir dalam pengelolaan limbah cangkang rajungan. Granovetter (1985) (dalam Zahri Nasution, 2008), menyoroti konsep embeddedness, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi di suatu komunitas tidak pernah berjalan terpisah dari ikatan sosial, melainkan selalu terkait dengan norma, nilai dan hubungan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, pilihan individu atau kelompok, seperti dalam menentukan cara pembuangan, pengolahan, atau memasarkan limbah rajungan tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh norma yang tidak tertulis, jaringan kepercayaan, dan rasa solidaritas yang terdapat dalam komunitas.

Dari perspektif lingkungan, pembuangan cangkang tanpa adanya pengelolaan yang tepat dapat merusak kualitas ekosistem pesisir, menciptakan bau tidak sedap, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, serta menyebabkan pencemaran air. Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa cangkang rajungan mengandung kitin yang dapat diubah menjadi kitosan, zat yang memiliki nilai tinggi dan kegunaan dalam bidang konsumsi, obat-obatan, serta pengolahan limbah.

Berdasarkan perspektif sosial, pengelolaan limbah yang berhasil di wilayah pedesaan pesisir sangat bergantung pada kerja sama, termasuk keinginan bersama, partisipasi aktif, dan manajemen komunitas (misalnya kelompok nelayan, kelompok pengupas, BUMDes, Bank Sampah, serta jaringan UMKM).





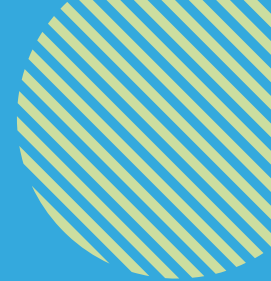
Produksi limbah dari cangkang rajungan di Desa Waruduwur sangat tinggi karena rajungan merupakan komoditas utama yang ditangkap serta diolah. Dari hasil wawancara terungkap bahwa para nelayan tidak hanya memperjualbelikan rajungan dalam keadaan utuh, tetapi juga menyetorkan hasil tangkapannya kepada ibu-ibu yang melakukan pengupasan untuk membedakan antara daging dan cangkangnya. Pak Muad (32 tahun) mengungkapkan, “saya menjual satu kilogram rajungan dengan harga Rp290.000, tetapi setelah dikupas, dagingnya saya serahkan kepada bos atau mertua. Cangkang biasanya saya sediakan untuk ibu-ibu atau pengolah”. pernyataan ini menunjukkan bahwa proses pengupasan rajungan menghasilkan limbah cangkang dalam jumlah besar setiap harinya.

Kolektivitas masyarakat pesisir di Desa Waruduwur sangat terlihat dari berbagai peran yang dimainkan oleh berbagai aktor, mulai dari nelayan hingga pengupas dan pengolah limbah cangkang rajungan. Ibu Yuyun, yang sudah 25 tahun berprofesi sebagai pengupas, mengatakan, “Saat musim rajungan, saya bekerja dari enam pagi hingga sore. Dalam sehari, saya bisa mendapatkan Rp100.000, namun jika sedikit bisa turun menjadi Rp70.000. Dagingnya saya serahkan kepada bos, cangkangnya diambil oleh pengepul untuk dikeringkan.” Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Rini yang berusia 37 tahun, “Sejak saya lulus SD, saya sudah mulai mengupas rajungan, dengan penghasilan harian bisa mencapai Rp100.000 sampai Rp150.000, tergantung jumlah rajungan yang ada. Saya memisahkan hasilnya, ada bagian badan, kaki, dan capit. Cangkangnya dikumpulkan lalu diambil oleh pengepul.”



Analisis teori embeddedness Granovetter (Granovetter, 1992) menekankan bahwa jaringan sosial sangat menentukan keberhasilan dari program pengembangan sosial ekonomi. Dari sini, proses produksi limbah sangat terkait dengan hubungan sosial ekonomi yang ada dalam komunitas. Nelayan menjual hasil tangkapan kepada mertua, pengepul, atau bos, sementara para ibu pengupas bekerja dalam kolaborasi di dalam jaringan sosial yang berbasis pada keluarga dan lingkungan. Dengan kata lain, perjalanan rajungan dari laut hingga menjadi limbah sepenuhnya berlangsung dalam jaringan sosial yang saling berhubungan.





Produksi limbah dari cangkang rajungan di Desa Waruduwur sangat tinggi karena rajungan merupakan komoditas utama yang ditangkap serta diolah. Dari hasil wawancara terungkap bahwa para nelayan tidak hanya memperjualbelikan rajungan dalam keadaan utuh, tetapi juga menyetorkan hasil tangkapannya kepada ibu-ibu yang melakukan pengupasan untuk membedakan antara daging dan cangkangnya. Pak Muad (32 tahun) mengungkapkan, “saya menjual satu kilogram rajungan dengan harga Rp290.000, tetapi setelah dikupas, dagingnya saya serahkan kepada bos atau mertua. Cangkang biasanya saya sediakan untuk ibu-ibu atau pengolah”. pernyataan ini menunjukkan bahwa proses pengupasan rajungan menghasilkan limbah cangkang dalam jumlah besar setiap harinya.

Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang mengurangi tingkat partisipasi. Pak Muad mengeluhkan ketidakmerataan bantuan, “Bantuan dari pemerintah seringkali tidak merata, yang dekat dengan kepala desa saja yang dapat. Misalnya bantuan cat kapal, saya tidak pernah mendapatkan.” Hambatan lain adalah keterbatasan dalam teknologi, seperti yang disampaikan oleh Pak Somat, “Saya memerlukan mesin penggiling, dulu saya memiliki satu tetapi sudah rusak. Sekarang harganya sekitar Rp15.000.000. Jika ada mesin itu, hasilnya bisa lebih cepat.” Selain itu, faktor eksternal seperti PLTU juga menjadi penghambat. Pak Muad mengungkapkan, “Saat ini tangkapan tidak maksimal karena adanya PLTU, sehingga harus berlayar dua jam ke tengah. Jika dekat tambat, hasilnya sedikit karena adanya limbah.”

Pengelolaan limbah cangkang rajungan di Desa Waruduwur, Cirebon, yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan rajungan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir. Limbah yang melimpah dari aktivitas pengupasan rajungan berpotensi menimbulkan pencemaran, namun juga menyimpan peluang ekonomi jika dikelola dengan tepat, misalnya melalui pemanfaatan kitin dan kitosan. Pemanfaatan berbasis komunitas ini memiliki potensi ganda: meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat lingkungan. Penelitian ini mendeskripsikan kondisi limbah, mengidentifikasi bentuk kolektivitas masyarakat, serta mengkaji faktor pendukung dan hambatan partisipasi dalam pengelolaannya. Dengan menggunakan teori jaringan sosial Granovetter, hasil studi menegaskan pentingnya penguatan jaringan sosial dan kolaborasi lintas aktor untuk mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan desa.





"Habitus Sosial dan Keterbatasan Modal: Hambatan Realisasi Potensi Mangrove di Desa Waruduwurr"



Penulis :

**Anastasya Putri, Keiko Dinda, Meidavyana Putri
Wibowo, Michael Delon Patadungan, Muhammad
Candra, Mohammad Farrel Khadafi, Sarah Rabiatul
Aulia**



Masyarakat pesisir bukan hanya hidup berdampingan dengan ekosistem mangrove, tetapi seharusnya juga menjadi bagian integral dari keberlangsungan ekosistem tersebut. Mangrove menyediakan berbagai manfaat langsung bagi masyarakat, seperti hasil tangkapan ikan, kepiting, udang, hingga bahan baku kayu dan madu. Lebih dari itu, mangrove juga memberikan jasa ekosistem berupa perlindungan pantai dari abrasi, penyerap karbon, serta penyaring alami bagi kualitas air yang secara langsung menunjang kehidupan masyarakat (Alongi, 2008; Barbier et al., 2011).



Penelitian kelompok empat ini berfokus pada dinamika ekosistem mangrove di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan melakukan penelusuran data secara langsung dan juga dengan mensintesis data dari literatur, jurnal ilmiah, dan laporan yang sudah ada. Pesisir Kabupaten Cirebon merupakan salah satu pesisir dengan keadaan mangrove mengkhawatirkan karena Kabupaten Cirebon hanya mempunyai mangrove dengan luas 1.780 ha dengan kondisi rusak 480 ha, kondisi sedang 200 ha dan rehabilitasi hanya 100 ha (Fatimatuzzahroh, 2019). Hal tersebut menunjukkan mirisnya kondisi mangrove yang akan berpengaruh pada menurunnya kualitas lingkungan pesisir.



Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting dalam menentukan kondisi ekosistem mangrove. Praktik pemanfaatan yang berkelanjutan seperti menjaga kawasan mangrove dari alih fungsi lahan, melakukan penanaman kembali, hingga mengembangkan ekowisata berbasis komunitas dapat memperkuat fungsi ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, praktik eksploitasi berlebihan dan konversi menjadi tambak atau pemukiman justru mempercepat degradasi lingkungan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri (Munandar, Pramanti & Chotim, 2022; Giri et al., 2011).

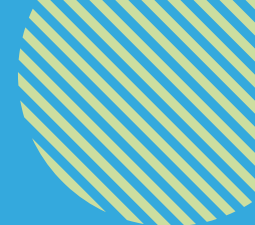


Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pesisir Cirebon dan khususnya Desa Waruduwur, menghadapi risiko abrasi yang sangat serius, dengan beberapa titik pantai yang mengalami kemunduran garis pantai, berpotensi mengancam permukiman warga dan tambak. Mangrove diidentifikasi sebagai "tameng alami" yang penting untuk menahan gelombang dan menstabilkan ekosistem pesisir. Kemudian ditambah lagi dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan yang berpenghasilan rendah serta akses pendidikan yang terbatas diperparah oleh keterbatasan anggaran desa. Pembangunan PLTU dan hibah ruang dalam pembuangan sampah di sekitar desa sangat mengurangi area mangrove dan membuat kekhawatiran sosial kesehatan tersendiri. Hal ini justru meningkatkan kerentanan lingkungan, menciptakan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan keberlanjutan lokal (data wawancara, 20 Agustus 2025). Masyarakat yang seharusnya menjadi bagian dari ekosistem mangrove justru menjadi pihak luar dan belum bisa memanfaatkan hasil optimal dari keberadaan mangrove. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan sosio-ekologis dalam pengelolaan mangrove, yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ini, menjaga hutan mangrove berarti menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengembangan ekowisata mangrove di Desa Waruduwur dengan pendekatan kolaborasi multi-aktor yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta.



Pendekatan ini diperkuat dengan perspektif habitus Pierre Bourdieu, yang digunakan untuk memahami pola pikir, praktik sosial, dan nilai-nilai masyarakat dalam berinteraksi dengan ekosistem mangrove. Dengan memahami habitus sosial masyarakat, diharapkan dapat ditemukan strategi perubahan perilaku yang mendorong masyarakat beralih dari pola pemanfaatan sumber daya menuju pengelolaan mangrove

Hambatan dan Realisasi Habitus Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. Hasil penelitian sementara ini menunjukkan bahwa pola pikir, praktik sosial, dan nilai-nilai masyarakat di Desa Waruduwur masih dipengaruhi oleh kebiasaan tradisional yang menekankan pemanfaatan mangrove untuk kebutuhan langsung, seperti menangkap ikan, kepiting, dan mengambil sampah plastik disekitar mangrove untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Warga memandang mangrove sebagai penahan ombak daripada sumber ekonomi alternatif.



Hambatan dan Realisasi Kolaborasi Multi-Aktor dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove.

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antaraktor di Desa Waruduwur masih berjalan parsial dan belum sinergis. Pemerintah memang telah membuat regulasi serta melaksanakan program rehabilitasi mangrove, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Dalam kerangka teori Bourdieu, kolaborasi yang kuat hanya bisa terwujud jika habitus masyarakat juga berubah. Pola interaksi sosial yang selama ini pasif perlu diarahkan menjadi lebih aktif dan partisipatif. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berbicara dan menentukan arah pembangunan bersama, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian mangrove. Berikut uraian modal yang di dapatkan:

- Modal Ekonomi: masyarakat bergantung pada hasil tangkapan ikan dengan penghasilan rendah
- Modal Kultural: rendahnya akses pendidikan formal dan keterampilan menghambat pemanfaatan mangrove secara inovatif.
- Modal Sosial: solidaritas antarwarga cukup kuat dalam menghadapi bencana alam
- Modal Simbolik: masyarakat lebih menghargai mangrove sebagai simbol "benteng alami"




Potensi Pengembangan Ekowisata sebagai Modal Sosial

Pengembangan ekowisata berbasis mangrove di Desa Waruduwur memiliki potensi untuk:

- Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui paket wisata edukatif, homestay, dan hasil olahan mangrove.
- memperkuat modal sosial masyarakat melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan ekowisata.
- mendorong perubahan sikap dari sekadar pemanfaatan.

Desa Waruduwur sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan ekowisata berbasis mangrove. Dari sisi ekonomi, ekowisata dapat memberikan peluang pendapatan baru mulai dari penyediaan paket wisata edukatif, homestay lokal, hingga penjualan produk olahan mangrove seperti sirup, sabun, atau batik mangrove. Dari sisi sosial, kegiatan ekowisata dapat memperkuat modal sosial masyarakat. Proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan bersama-sama dapat menumbuhkan solidaritas, rasa memiliki, dan kerja sama antarwarga. Pendekatan habitus dan kolaborasi multi-aktor menjadi kunci dalam pengembangan ini. Desa Waruduwur sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan ekowisata berbasis mangrove. Potensi ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sosial dan ekologis. Jika dikelola dengan baik, ekowisata dapat menjadi jembatan antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ekonomi, ekowisata dapat memberikan peluang pendapatan baru mulai dari penyediaan paket wisata edukatif, homestay lokal, hingga penjualan produk olahan mangrove seperti sirup, sabun, atau batik mangrove





Masyarakat dapat memperoleh keuntungan finansial sekaligus menjaga lingkungan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dari sisi sosial, kegiatan ekowisata dapat memperkuat modal sosial masyarakat. Proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan bersama-sama dapat menumbuhkan solidaritas, rasa memiliki, dan kerja sama antarwarga. Sementara dari sisi lingkungan, ekowisata mendorong masyarakat untuk menjaga ekosistem karena keberlanjutan wisata bergantung pada kelestarian alam itu sendiri.

Pendekatan habitus dan kolaborasi multi-aktor menjadi kunci dalam pengembangan ini. Dengan memahami nilai-nilai lokal dan cara berpikir masyarakat, strategi pengembangan dapat disesuaikan agar diterima dan dijalankan secara sukarela. Pendekatan yang memadukan pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal akan menghasilkan pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan prinsip sosio-ekologis (Dahdouh-Guebas & Koedam, 2008), keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menjaga hutan mangrove berarti menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, ekowisata bukan hanya tentang wisata, melainkan tentang pendidikan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan identitas lokal.



Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan mangrove di Desa Waruduwur sangat bergantung pada kesadaran dan peran aktif masyarakat pesisir. Saat ini, masyarakat masih memandang mangrove sebatas pelindung pantai, bukan sebagai sumber ekonomi yang bisa dikelola secara berkelanjutan. Rendahnya pendidikan dan keterbatasan modal menjadi hambatan utama dalam perubahan cara pandang tersebut.

Meski begitu, munculnya kesadaran baru di kalangan pemuda dan tokoh masyarakat memberi harapan bahwa perubahan bisa terjadi. Dengan pendampingan, edukasi, dan kerja sama lintas pihak pemerintah, akademisi, dan masyarakat mangrove dapat dikelola bukan hanya untuk menjaga alam, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan hal itu. Ekowisata dapat menjadi ruang belajar, sumber ekonomi baru, sekaligus cara menjaga alam tetap lestari. Dengan sinergi yang baik, Desa Waruduwur berpotensi menjadi contoh desa pesisir yang mampu hidup selaras dengan alam melalui pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.



